

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press.
Ed. 1. Cet. 1.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Hamzah, Andi. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. (2008). *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Mansyur, Ridwan. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B. P. Universitas Diponegoro.
- Siregar, Mahmud dkk. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetejoe, Waiati. (2007). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. Cet. 4.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1994).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946. Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang
Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang Diubah

dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Artikel / Jurnal

Ahmad, Ibrahim. (2018). “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran

Hukum Masyarakat”. *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1.

Alfitra. (Juni, 2017). “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Sistem Hukum

Pidana Indonesia dan Hukum Islam”. *Istinbáth*, Vol. 16, No. 1.

Anjari, Warih. (April, 2014). “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan

(Violence)”. *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 1.

Farida, Elfia. (Oktober, 2011). “Implementasi Prinsip Pokok *Convention on*

the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Di

Indonesia”. MMH, Jilid 40 No. 4.

Lasan. (November, 2019). “Implementasi Teori *Restorative Justice* Mewujudkan

Keadilan yang Berimbang”. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*,

Vol.1, No. 2

Skripsi

Helmi, A. (2016). *Konsep Mediasi Penal untuk Restorative Justice dalam*

Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum

Positif). Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Livia, A. (2021). *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu*

Lintas. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riza, P. (2019). *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam
Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*.
Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.

